

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kemajuan kontemporer dalam teknologi dan sistem informasi telah mendorong transformasi yang cepat di berbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan ini terinspirasi oleh revolusi transformatif selama era Revolusi Industri Keempat. Transformasi ini memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, mencakup kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Perubahan juga dapat diamati di dalam entitas pemerintah yang beroperasi di tingkat federal, regional, dan lokal.

Dengan mengembangkan Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024, yang terdiri dari empat pilar, termasuk infrastruktur digital, pemerintah Indonesia menunjukkan akselerasi transformasi digital dengan sangat serius. Sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang ekosistem layanan dan ekonomi digital, masyarakat digital, ekonomi digital, dan pemerintahan digital.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat seperangkat peraturan mendasar yang mengatur penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi elektronik di seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia. Tingkatan tersebut meliputi tingkat Kementerian, Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, dan Kelurahan. Implementasi SPBE memiliki arti penting karena berpotensi memberikan banyak manfaat bagi instansi dan pengguna layanan dalam integrasi dan perwujudan data terpadu di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), tujuan penerapan SPBE adalah untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh instansi atau badan yang ada dengan tujuan untuk memudahkan penyediaan layanan publik secara efektif dan efisien

Pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan UU No. 6/2014 tentang desa. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah desa diamanatkan untuk membangun praktik tata kelola yang efektif dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola desa yang transparan. Pemerintah desa harus memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mengharuskan pemerintah desa untuk menggunakan pendekatan inovatif untuk mendigitalisasi operasi pemerintah, di mana inovasi dalam penerapan digitalisasi dalam urusan pemerintahan menjadi hal yang tidak terelakkan.

Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil, telah menyatakan aspirasinya untuk mentransformasi Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Digital, yang dibuktikan dengan responnya terhadap kemajuan teknologi saat ini. Visi ini tercermin dalam situs web resmi *digitalservice.jabarprov.go.id*. Disarankan agar desa-desa mengadopsi kemajuan teknologi kontemporer dengan menerapkan digitalisasi untuk penyediaan layanan di lingkup desa. Inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital didorong oleh kesenjangan yang signifikan dalam kemajuan teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Ketiadaan infrastruktur yang memadai di daerah pedesaan menjadi penghalang bagi penduduk desa untuk mengakses dan mendapatkan keuntungan dari keuntungan yang dihadirkan oleh teknologi digital. Situasi ini mendorong lahirnya Jabar *Digital Service* (JDS), yang juga dikenal sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital Data dan Informasi Geospasial Jabar. JDS adalah sebuah divisi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mentransformasi pemanfaatan teknologi untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah Jawa Barat dengan menghilangkan kesenjangan digital.

Sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di kawasan Asia Pasifik, telah menunjukkan pencapaian yang patut dipuji dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagian digital dan inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dikenal sebagai Jabar *Digital Service*,

dianugerahi penghargaan bergengsi pada tahun 2020. *International Data Corporation* mengakui divisi ini atas ketangguhan teknologinya yang luar biasa. Desa Digital yang didirikan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat telah mendapatkan pengakuan di skala Asia Pasifik (*jabarprov.go.id*).

Desa Digital adalah program yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk meningkatkan potensi daerah pedesaan. Program ini berfokus pada berbagai aspek, termasuk strategi pemasaran, kemudahan akses layanan informasi, dan percepatan pembangunan di desa-desa tersebut secara keseluruhan. Digitalisasi memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan desa dan menjadi faktor penting dalam kemampuan Pemerintah Desa untuk menavigasi persaingan digital dan mendorong desa-desa mempercepat pembangunan desa yang mandiri dan progresif.

Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga November 2023, baru 60% dari total jumlah desa di Indonesia yang terkoneksi dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Artinya, masih banyak desa yang belum menerapkan digitalisasi dalam pelayanan publik. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai penerapan digitalisasi pelayanan publik di desa tertentu, namun belum ada data komprehensif mengenai jumlah desa yang belum menerapkan digitalisasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Dari 5.312 desa di Provinsi Jawa Barat dan 83.794 desa di seluruh Indonesia, Desa Cibiru Wetan merupakan salah satu desa yang berhasil berinovasi menjadi desa digital (*digitaldesa.id*).

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan perlunya mereplikasi pengembangan desa digital di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Beberapa desa telah dikunjungi, termasuk di Kabupaten Subang, Garut, dan Tasikmalaya. Ahab Sihabudin, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, mengatakan bahwa Desa Cibiru Wetan mewakili konsep desa yang berkembang dengan baik dan inovatif. Sebab, desa ini telah berhasil menjalani digitalisasi, terbukti dengan kesiapannya dalam berbagai komunitas digital yang ada di Jawa Barat.

Desa Cibiru Wetan merupakan lokasi yang sangat strategis dalam membangun Desa Digital dilihat dari aksesibilitas yang sudah cukup memadai, adanya wujud partisipasi dan kepedulian masyarakat guna mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang tertuang pada Intruksi Kepala Desa Cibiru Wetan Nomor : 02 Tahun 2022 Tentang Rahayat Cibiru Wetan Kudu Nyaho serta setiap kepala keluarga dari penduduk desa telah memiliki akses *mobilephone* sehingga hal ini akan memudahkan warga dalam mengakses layanan digital yang diberikan oleh Pemerintah Desa yakni melalui aplikasi Simpel Desa (Sistem Pelayanan Desa) yang bisa diunduh melalui *Playstore* oleh masyarakat.

Simpel Desa adalah sistem berbasis web terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan informasi layanan untuk desa. Sistem ini memiliki antarmuka *dashboard* dan dilengkapi dengan aplikasi *Android*. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi antara pemerintah desa, penyedia layanan, dan bisnis lokal, serta mendorong kolaborasi dan keterlibatan yang lebih baik di dalam masyarakat. Fitur utama yang ada dalam layanan ini yaitu meliputi administrasi, pelayanan, dan ekonomi. Selain itu, aplikasi Simpel Desa juga memiliki beberapa fitur lain, diantaranya yaitu fitur pelayanan surat menyurat, fitur info dan berita desa, japri BPD, japri Pemdes, fitur e-bisnis (grosir desa dan pasar desa), *Panic button* (peringatan bila terjadi keadaan darurat), dan Mitra BUMDes.

**Tabel 1. 1 Fitur Utama Layanan Digital Simpel Desa**

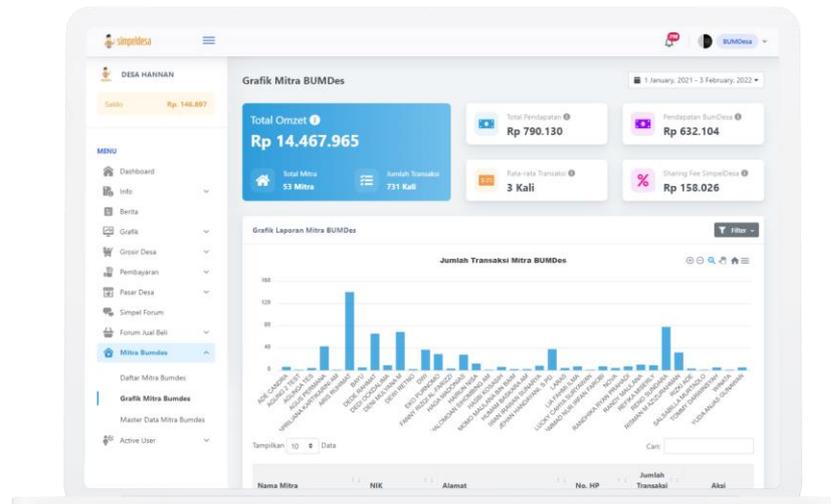
No	Fitur Utama	Fungsi	Layanan
1.	Administrasi Pelayanan	Mengerjakan segala bentuk administrasi surat menyurat pemerintah desa yang dikerjakan dengan mudah dan cepat serta dilakukan secara <i>online</i> . Melalui aplikasi ini masyarakat cukup memasukkan NIK dan menekan tombol permohonan untuk melakukan permintaan penerbitan surat	Surat keterangan usaha, status, domisili, pernikahan, kematian, kelahiran,

		yang diperlukan tanpa perlu datang ke kantor desa. Berdasarkan permintaan yang masuk pada aplikasi, operator desa akan memproses permohonan tanpa melakukan lagi proses pengetikan mengingat surat yang diminta telah diproses secara elektronik.	kehilangan, dan surat lainnya
2.	Ekonomi Desa	<p>1. Memfasilitasi para pelaku UMKM di Desa Cibiru Wetan untuk memajang dan mempromosikan produk mereka di kanal Pasar Desa</p> <p>2. Memberikan ruang media pada pemerintah Desa melalui BUMDesa untuk melakukan usaha di bidang E-Bisnis Pemerintah desa dan masyarakat menggali potensi ekonomi digital dengan berperan aktif melalui semua transaksi usaha melalui aplikasi simpel desa dengan target perputaran uang di wilayah desa dengan output berkembangnya BUMDesa dan bertambahnya PADes</p>	Pasar Desa, Grosir Desa,

Sumber : *simpeldesa.com* (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, Desa Cibiru Wetan berbeda dengan desa lainnya yang hanya menerapkan metode pengambilan berkas secara mandiri ke kantor desa setelah pencetakan berkas selesai sedangkan Desa Cibiru Wetan berinovasi dan berkomitmen untuk memberdayakan potensi ekonomi yang ada di desa salah satunya dengan memanfaatkan jasa antar oleh ojek lokal warga setempat. Desa Cibiru Wetan menawarkan dua opsi pengambilan berkas sesuai keinginan pemohon, operator desa akan menghubungi pemohon untuk menawarkan opsi proses pengambilan berkas yaitu pengambilan berkas secara mandiri ke kantor desa atau menggunakan jasa ojek lokal warga setempat untuk diantarkan ke rumah

pemohon. Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya dalam menerapkan layanan desa secara digital yang bahkan dapat berimbas juga ke potensi ekonomi lainnya, contohnya seperti jasa layanan *delivery* berkas melalui jasa ojek warga setempat.



**Gambar 1. 1 Layanan Digital Simpel Desa**

Sumber : [simpeldesa.com](http://simpeldesa.com) (diakses pada 20 Oktober 2023)

Berdasarkan gambar di atas, Simpel Desa memiliki fitur Mitra BUMDes yang dapat membuka ruang bagi warga desa, UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui monetisasi transaksi yang berlangsung secara digital melalui aplikasi Simpel Desa. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di Pemerintahan Desa memiliki ruang untuk mengimplementasikan penggunaan *platform* digital untuk mengembangkan ekosistem desa digital dalam menuju desa mandiri dan maju. Simpel Desa dapat mengembangkan ekosistem ekonomi digital dalam digitalisasi desa serta pemerintah desa dapat menghubungkan warga desa dengan sesama warga desa lainnya. Saat proses monetisasi transaksi berlangsung BUMDes mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi digital yang ada. Dengan demikian, semakin besar jumlah transaksi digital melalui Simpel Desa akan berimplikasi secara positif terhadap penambahan jumlah PADes yang dapat dikelola oleh BUMDes.

Berikut tabel Pendapatan Asli Desa (PADes) Cibiru Wetan pada tahun 2020 sampai 2023 :

**Tabel 1. 2 Pendapatan Asli Desa (PADes) Cibiru Wetan Tahun 2020-2023**

1	2020	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>29.500.000</b>	
		a	Hasil Usaha Desa	6.000.000
		b	Hasil Aset Desa	10.000.000
		c	Lain lain PAD	13.500.000
2	2021	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>101.200.000</b>	
		a	Hasil Usaha Desa	16.000.000
		b	Hasil Aset Desa	5.000.000
		c	Lain lain PAD	80.200.000
3	2022	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>333.800.000</b>	
		a	Hasil Usaha Desa	48.800.000
		b	Hasil Aset Desa	-
		c	Lain lain PAD	285.000.000
4	2023	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>133.500.000</b>	
		a	Hasil Usaha Desa	61.000.000
		b	Hasil Aset Desa	-
		c	Lain lain PAD	72.500.000

Sumber : Laporan APBDes Desa Cibiru Wetan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Cibiru Wetan dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan semenjak mengimplementasikan layanan digitalisasi desa. Adanya layanan ini memfasilitasi para pelaku UMKM di Desa Cibiru Wetan untuk memajang dan mempromosikan produk mereka di kanal Pasar Desa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan prospek baru bagi para peserta UMKM, sehingga memfasilitasi pengenalan produk mereka di masyarakat, khususnya di tingkat lokal di Desa Cibiru Wetan. Layanan Sempel Desa Cibiru Wetan memiliki potensi yang signifikan untuk pemasaran digital. Pengamatan yang disebutkan di atas didukung oleh data statistik yang disediakan

oleh [cibiruwetan.go.id](http://cibiruwetan.go.id), yang menunjukkan bahwa desa ini terdiri dari 5.400 rumah tangga dan populasi kumulatif sebesar 18.000 orang.

Tim Penggerak PKK Desa Cibiru Wetan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang memiliki fungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ikut berperan serta dengan lembaga desa lainnya dengan ikut serta mempromosikan produk UMKM Cibiru Wetan melalui fitur Pasar Desa dan Grosir Desa pada layanan aplikasi Sempel Desa. Ny. Oneng Nani selaku Ketua TP-PKK Desa Cibiru Wetan berupaya untuk mendorong para anggota TP-PKK Desa dan Kader Posyandu untuk peduli usaha warga sekitarnya dengan mempromosikan dan membangun komitmen untuk saling belanja di UMKM desa secara *online*. Dengan cara ini TP-PKK tidak hanya membantu mengenalkan aplikasi layanan digital desa sekaligus juga merupakan program kegiatan POKJA II berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan gotong royong dimana bentuk gotong royong tersebut diantaranya adalah membantu UMKM warga sekitar.

Selain melalui Pasar Desa dan Grosir Desa *online* TP-PKK Desa Cibiru Wetan juga berinisiatif untuk mendorong warga untuk mengunduh aplikasi layanan Sempel Desa dengan memberikan program insentif khususnya di bidang pembinaan Posyandu melalui lomba balita fotogenik. Dalam program ini TP-PKK mengajak warga yang memiliki balita untuk berkreasi sekreatif mungkin untuk memposting foto pada aplikasi Sempel Desa. Desa menyediakan hadiah total sebesar Rp.500.000 untuk pemenang foto terbaik. Dengan adanya program serta inovasi ini membuat warga antusias untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu dan cukup sukses dalam mendorong peningkatan warga Desa Cibiru Wetan untuk mengunduh layanan aplikasi Sempel Desa yang dimana pengguna aplikasi bertambah sebanyak 800 warga.

Studi Tiru Gardana Desa yang telah berlangsung di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 23-25 Mei 2022 telah menginspirasi aparat desa se-Kabupaten Lombok Timur untuk mendigitalisasi desa melalui layanan Sempel Desa dari *Smart Village Nusantara* PT Telkom ([simpeldesa.com](http://simpeldesa.com)). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten

Lombok Timur mendukung program desa digital dengan mengimplementasikan aplikasi Simpel Desa berbasis *android* dan *dashboard* berbasis *website* yang dapat dioperasikan oleh aparat pemerintahan desa sebagai wujud perubahan teknologi informasi dan komunikasi dalam lini kehidupan warga Desa Lombok Timur guna mempermudah pelayanan dan pengembangan perekonomian berbasis digitalisasi layaknya Desa digital yang telah hadir di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung

Digitalisasi yang dilakukan Desa Cibiru Wetan telah dimulai sejak 2020 lalu dan hingga saat ini, sejumlah layanan berbasis digital telah berkembang dan diimplementasikan. Tahun 2020 merupakan awal dari mulainya Desa Cibiru Wetan mendigitalisasikan layanan desa. Awal mula penerapan layanan digital ini dilatarbelakangi oleh adanya keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparat desa dari segi ketepatan waktu dan antrian yang lama. Digitalisasi ini diimplementasikan sebagai bentuk komitmen desa dalam rangka mematuhi regulasi SPBE yang diterbitkan pemerintah Indonesia dalam Perpres No. 95 tahun 2018 dan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 mengenai ekosistem pelayanan dan ekonomi digital serta untuk mewujudkan komitmen Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi Digital. Hal ini didasari dengan asosiasi Desa Cibiru Wetan dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung *Smartcity* yang dimana pada tahun 2020 merupakan awal lahirnya COVID-19 yang membuat layanan desa pada awalnya berjalan normal menjadi terhambat karena protocol kesehatan yang harus diterapkan dan pelayanan desapun tidak berjalan optimal dengan semestinya, sehingga pemanfaatan teknologi menjadi pilihan sebagai solusi untuk masalah tersebut. Maka oleh karena itu digitalisasi layanan desa ini sangat layak untuk dijadikan sebuah inovasi dalam pelayanan pada masyarakat.

Dalam menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada pemerintahan sektor publik, terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* (Indrajit, 2016). Elemen sukses tersebut adalah *support* (dukungan dari pemerintah berkaitan dengan pemanfaatan *e-government*), *capacity* (kemampuan pemerintah

dalam mewujudkan pemanfaatan *e-government*) dan *value* (manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan *e-government*). Apabila ketiga elemen tersebut sudah diterapkan dalam penerapan *e-government* maka suatu instansi dapat dikatakan sukses atau berhasil dalam mengaplikasikannya.

Fenomena meluasnya adopsi teknologi berupa *e-government* di tingkat desa membutuhkan respon yang cerdas dari pemerintah desa. Pemanfaatan internet sebagai alat untuk menggali potensi desa, diikuti dengan realisasi potensi tersebut menjadi sumber daya yang bernilai, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah desa di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang dikenal dengan nama Cibiru Wetan, telah mengambil langkah untuk menanggapi fenomena ini. Di tingkat regional dan nasional, desa ini telah memenangkan berbagai penghargaan dan pengakuan, termasuk juara pertama dalam Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bandung, Lomba Desa Tingkat Provinsi, dan Lomba Desa Tingkat Nasional. Selain itu, desa ini juga telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai anggota *ASEAN Village Network 2023* (*cibiruwetan.desa.id*)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung menyelenggarakan acara Gebyar Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung. Dalam acara ini, Desa Cibiru Wetan diakui sebagai penerima penghargaan bergengsi Desa Wisata Terbaik Kategori Digital Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2022. Perolehan penghargaan ini tidak terlepas dari banyaknya kunjungan dari berbagai daerah untuk menyaksikan proses digitalisasi di Desa Cibiru Wetan. Selain itu, Desa Cibiru Wetan ditetapkan menjadi desa terbaik di Jawa Barat terkait implementasi keterbukaan informasi publik, hal tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat No. 443/PMD.01/BINDES tanggal 8 Juli 2021.

Beranjak dari fenomena yang terjadi sehubungan adanya inovasi pelayanan dan ekonomi digital yang diimplementasikan oleh Desa Cibiru Wetan telah meraih prestasi Anugerah Desa Wisata Terbaik Kategori Digital Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2022 membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana upaya elemen keberhasilan penerapan *e-government* inovasi pelayanan dan ekonomi

digital melalui Simpel Desa yang telah diimplementasikan oleh Desa Cibiru Wetan. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah inovasi pelayanan dan ekonomi digital yang diimplementasikan oleh Desa Cibiru Wetan selama ini dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil, maka peneliti tertarik untuk meneliti sebuah topik yang berjudul **“Inovasi Pelayanan dan Ekonomi Digital Melalui Aplikasi Simpel Desa Cibiru Wetan”**

## **B. Perumusan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi peneliti, berbagai upaya pemerintah Desa Cibiru Wetan melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan zaman yang mengedepankan teknologi informasi, apakah inovasi tersebut dapat dikatakan berhasil dan tidak berhasil maka dapat dirumuskan rumusan penelitian, yaitu :

- 1) Bagaimana *support* (dukungan) dalam penerapan inovasi pelayanan dan ekonomi digital melalui aplikasi Simpel Desa Cibiru Wetan?
- 2) Bagaimana *capacity* (kemampuan) dalam penerapan inovasi pelayanan dan ekonomi digital melalui aplikasi Simpel Desa Cibiru Wetan?
- 3) Bagaimana *value* (manfaat) dalam penerapan inovasi pelayanan dan ekonomi digital melalui aplikasi Simpel Desa Cibiru Wetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *support* (dukungan) dalam penerapan inovasi pelayanan dan ekonomi digital melalui aplikasi Simpel Desa Cibiru Wetan
- 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *capacity* (kemampuan) dalam penerapan inovasi pelayanan dan ekonomi digital melalui aplikasi Simpel Desa Cibiru Wetan

- 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *value* (manfaat) dalam penerapan inovasi pelayanan dan ekonomi digital melalui aplikasi Simpel Desa Cibiru Wetan

#### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, institusi yang bersangkutan, dan peneliti sendiri. Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dalam pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan tata kelola organisasi, inovasi, dan digitalisasi layanan dalam konteks konsep *e-government*. Penelitian ini secara khusus memberikan kontribusi pada studi inovasi layanan dan ekonomi digital dalam administrasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian ilmiah atau penelitian di masa depan dengan memberikan wawasan teoritis dan kontribusi analitis.

- b. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan tugas akhir, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi para peneliti tentang keberhasilan penerapan inovasi *e-government* di sektor publik, khususnya di bidang pelayanan publik dan pembangunan ekonomi digital di masyarakat pedesaan.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan Ilmu Administrasi Publik dan *E-government*, baik dari segi teori maupun aplikasi praktis. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi dan kutipan yang dapat menjadi referensi untuk membantu para peneliti di masa depan dalam studi mereka.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi lembaga-lembaga desa lainnya yang ingin menerapkan layanan berbasis digital di dalam komunitas mereka. Hal ini sangat relevan mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi, terutama di bidang pelayanan publik, yang terus berkembang untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat.

### **E. Kerangka Berpikir**

Desa Cibiru Wetan merupakan lokasi yang sangat strategis dalam membangun Desa Digital dilihat dari aksesibilitas yang sudah cukup memadai, serta adanya wujud partisipasi dan kepedulian masyarakat guna mewujudkan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang tertuang pada Intruksi Kepala Desa Cibiru Wetan Nomor : 02 Tahun 2022 Tentang Rahayat Cibiru Wetan Kudu Nyaho. Melalui Studi Tiru Gardana Desa yang telah berlangsung di Desa Cibiru Wetan pada 23-25 Mei 2022 telah menginspirasi aparat desa se-Kabupaten Lombok Timur untuk mendigitalisasi desa melalui layanan Simpel Desa (Sistem Pelayanan Desa)

Layanan digital melalui Simpel Desa yang diimplementasikan oleh Desa Cibiru Wetan merupakan sebagai bentuk komitmen mematuhi regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterbitkan pemerintah Indonesia dalam Perpres No. 95 tahun 2018 dan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 mengenai ekosistem pelayanan dan ekonomi digital serta untuk mewujudkan komitmen Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi Digital. Hal ini didasari dengan asosiasi Desa Cibiru Wetan dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung *Smartcity* yang dimana pada tahun 2020 merupakan awal lahirnya COVID-19 yang membuat layanan desa pada awalnya berjalan normal menjadi terhambat karena protokol kesehatan yang harus diterapkan dan pelayanan desapun tidak berjalan optimal dengan semestinya, sehingga pemanfaatan teknologi menjadi pilihan sebagai solusi

untuk masalah tersebut. Maka oleh karena itu digitalisasi layanan desa ini sangat layak untuk dijadikan sebuah inovasi dalam pelayanan pada masyarakat.

Desa Cibiru Wetan telah banyak menorehkan prestasi dan penghargaan baik tingkat regional maupun nasional. Adanya inovasi pelayanan dan ekonomi digital yang diimplementasikan oleh Desa Cibiru Wetan telah meraih prestasi Anugerah Desa Wisata Terbaik Kategori Digital Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2022. Digitalisasi yang dilakukan Desa Cibiru Wetan telah dimulai sejak 2020 lalu dan hingga saat ini, sejumlah layanan berbasis digital telah berkembang dan diimplementasikan yang diiringi dengan sumber daya manusia yang kompeten, untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan prima dan berkualitas.

Penelitian ini berfokus pada Inovasi Pelayanan dan Ekonomi Digital khususnya pada Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dilakukannya penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana upaya strategi keberhasilan dalam penerapan inovasi pelayanan dan ekonomi digital melalui aplikasi Simpel Desa pada Desa Cibiru Wetan. Penelitian ini berhubungan dengan kajian mengenai *e-government*. *E-government* mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

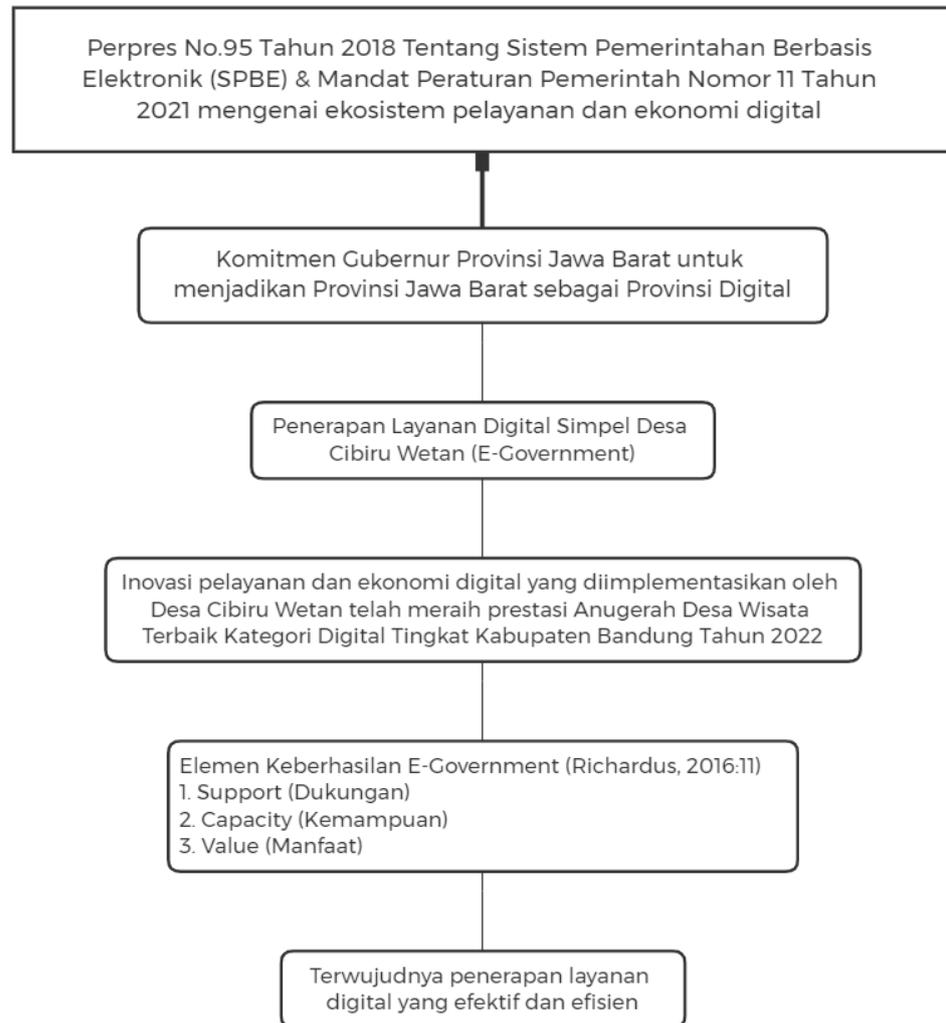
Penelitian ini dilakukan guna menggali lebih dalam mengenai penerapan inovasi pelayanan dan ekonomi digital di Desa Cibiru Wetan yang berdasarkan pada teori elemen keberhasilan *e-government* pada sektor publik menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School Of Government* oleh (Indrajit, 2016) terdiri dari tiga indikator yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji fenomena yang diteliti yaitu : (1) *Support* (Dukungan) merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki sebab perlu adanya kemauan dan komitmen dalam menerapkan konsep *E-government*, (2) *Capacity* (Kemampuan) merupakan unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-government* terkait menjadi kenyataan., (3) *Value* (Manfaat) artinya berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut dan dalam hal ini, yang

menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan merekalah yang berkepentingan (*demand side*). Alasan peneliti menggunakan teori ini sebab teori ini relevan untuk menjawab fenomena yang akan diteliti serta mencakup dimensi dan indikator dalam keberhasilan penerapan layanan digital *e-government*.

Hasil dari penerapan inovasi pelayanan dan ekonomi digital yang tepat guna akan berdampak baik pada lingkup desa salah satunya yaitu tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan layanan digital, sistem pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, mengoptimalkan potensi desa melalui penggunaan teknologi digital, meningkatkan PADes, serta tercapainya *good governance* dalam pelayanan publik. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terhubung dengan teknologi digital akan berkontribusi juga terhadap pendapatan desa sehingga kesejahteraan masyarakat di desa tersebut juga akan meningkat.

Berikut adalah kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai gambaran penelitian :





**Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran**

Sumber : diolah peneliti